

**ANALISIS PENGARUH TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
(*GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE*)
TERHADAP TINGKAT PENERIMAAN PAJAK**

(SKRIPSI)

Oleh
FASLAN SYAM SAJIAH
NPM 1511031150



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI
2017**

ABSTRACT

Analysis of The Effect of Good Government Governance on Tax Revenue

**by
Faslan Syam Sajiah**

The purpose of this study is to prove empirically about the influence of good government governance on the level of tax revenue. Good governance uses six indicators from the World Bank, namely voice and accountability, political stability and absence of violence, government effectiveness, regulatory quality, rule of law, and control of corruption. After performing multiple regression analysis with fixed effect model on panel data set for 37 Asian countries during 2002 — 2014, the result showed that the variable of voice and accountability and control of corruption have a positive effect to the level of tax revenue. The regulatory quality and rule of law variables are negatively affected. Meanwhile, political stability and absence of violence and government effectiveness variables do not affect the level of tax revenue.

Keyword : good government governance, tax revenue, voice and accountability, control of corruption

ABSTRAK

Analisis Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Government Governance*) terhadap Tingkat Penerimaan Pajak

**Oleh
Faslan Syam Sajiah**

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris tentang pengaruh tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) terhadap tingkat penerimaan pajak. Tata kelola pemerintahan yang baik menggunakan enam indikator dari Bank Dunia, yakni *voice and accountability*, *political stability and absence of violence*, *government effectiveness*, *regulatory quality*, *rule of law*, dan *control of corruption*. Setelah melakukan analisis regresi berganda dengan menggunakan metode *fixed effect model* (FEM) terhadap data panel dari 37 negara Asia dalam periode 2002 — 2014, hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel *voice and accountability* dan *control of corruption* berpengaruh positif terhadap tingkat penerimaan pajak. Variabel *regulatory quality* dan *rule of law* berpengaruh secara negatif. Sementara itu, variabel *political stability and absence of violence* dan *government effectiveness* tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak.

Kata Kunci: *Good Governance*, *Good Government Governance*,
Penerimaan Pajak, *voice and accountability*, korupsi

**ANALISIS PENGARUH TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
(GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE)
TERHADAP TINGKAT PENERIMAAN PAJAK**

Oleh
FASLAN SYAM SAJIAH
NPM 1511031150

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA EKONOMI

Pada
Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI
2017

Judul Skripsi

: ANALISIS PENGARUH TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE) TERHADAP TINGKAT PENERIMAAN PAJAK

Nama Mahasiswa

: Faslan Syam Sajiah

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1511031150

Program Studi

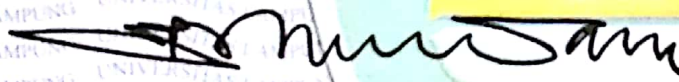
: Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis

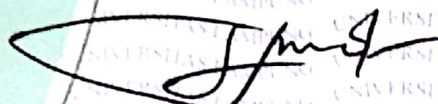
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt.

NIP 19560620 198603 1 003

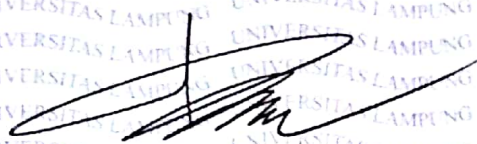


Yenni Agustina, S.E., M.Sc., Akt., CA.

NIP 19830830 200604 2 001

MENGETAHUI

2. Ketua Jurusan Akuntansi



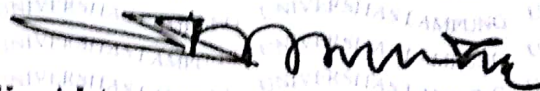
Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.

NIP 19620612 199010 2 001

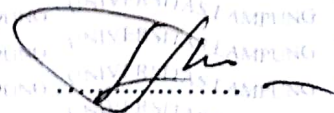
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

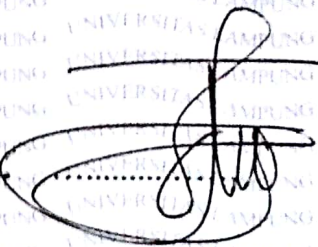
Ketua : Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt.



Sekretaris : Yenni Agustina, S.E., M.Sc., Akt., CA.



Penguji Utama : Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP 19610904 198703 1 011



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 8 Agustus 2017

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Government Governance*) terhadap Tingkat Penerimaan Pajak” adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan saya ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Agustus 2017
Penulis,



Faslan Syam Sajiah
NPM 1511031150

RIWAYAT HIDUP



Faslan Syam Sajiah, lahir di Kendari pada tanggal 6 Juni 1989 dari pasangan Bapak Drs. La Niru (alm.) dan Ibu Dra. Nursyamsiah, merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Dian Ekawati Kendari, pada tahun 1995. Dilanjutkan dengan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Kambu, Kendari dan lulus pada tahun 2001. Kemudian, penulis menyelesaikan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 5 Kendari yang diselesaikan pada tahun 2004, lalu dilanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas di SMA Negeri 2 Kendari hingga lulus pada tahun 2007. Penulis melanjutkan pendidikan Diploma III Spesialisasi Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang diselesaikan pada tahun 2011. Pada tahun 2012 penulis merintis karir sebagai pelaksana di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hingga akhirnya pada tahun 2015 mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan sarjana di Jurusan Akuntansi Universitas Lampung melalui program *State Accountability Revitalization Project (STAR)* yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerjasama dengan *Asian Development Bank (ADB)*.

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan untuk
Fidhyah Azzahra dan Rayyis Kaitsar Ramadhan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Government Governance*) terhadap Tingkat Penerimaan Pajak”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih ditemukan banyak kekurangan, karenanya penulis terbuka terhadap berbagai saran dan masukan guna perbaikan di masa depan. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis pribadi maupun bagi pembaca.

Bandar Lampung, Agustus 2017

Faslan Syam Sajiah

SANWACANA

Puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat petunjuk-Nya lah skripsi berjudul “Analisis Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Government Governance*) terhadap Tingkat Penerimaan Pajak” dapat diselesaikan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Sehingga dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt., sebagai Dosen Pembimbing I. Terima kasih atas segala motivasi, bimbingan, dan masukan yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi
3. Ibu Yenni Agustina, S.E., M.Sc., Akt., CA., sebagai Dosen Pembimbing II sekaligus pembimbing akademik selama melanjutkan studi di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Terima kasih

atas segala motivasi, bimbingan, dan masukan yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi

4. Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E. M.Si., Akt., selaku Dosen Penguji. Terima kasih atas segala motivasi, bimbingan, dan masukan yang diberikan guna penyempurnaan skripsi.
5. Ibu Agustina Awan, Bapak Noveriadi, Bapak Sulaiman, Bapak Yogi, beserta seluruh dosen, karyawan, dan civitas akademika di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, terima kasih atas segala pelayanan dan bantuan yang diberikan.
7. Seluruh rekan-rekan STAR BPKP Batch II Universitas Lampung, terima kasih atas kebersamaan yang diberikan selama ini.
8. Seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan dan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, Agustus 2017

Penulis,

Faslan Syam Sajiah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Pembatasan Penelitian	5
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian	6
II. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	7
2.1. Landasan Teori	7
2.1.1 Teori Keagenan	7
2.1.2 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Government Governance</i>)	7
2.1.2.1 <i>Voice and Accountability (VA)</i>	10
2.1.2.2 <i>Political Stability (PS)</i>	11
2.1.2.3 <i>Government Effectiveness</i>	11
2.1.2.4 <i>Regulatory Quality (RQ)</i>	12
2.1.2.5 <i>Rule of Law (RL)</i>	12
2.1.2.6 <i>Control of Corruption (CC)</i>	13
2.1.3 Determinan Penerimaan Pajak	14
2.2 Penelitian Terdahulu	16
2.3 Hipotesis	17
2.4 Kerangka Pemikiran	19
III. METODE PENELITIAN	20
3.1 Jenis dan Sumber Data	20
3.2 Populasi dan Sampel	20
3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	20
3.3.1 Variabel Dependen	20
3.3.2 Variabel Independen	21

3.3.2.1	<i>Voice and Accountability (VA)</i>	21
3.3.2.2	<i>Political Stability (PS)</i>	21
3.3.2.3	<i>Government Effectiveness</i>	22
3.3.2.4	<i>Regulatory Quality (RQ)</i>	22
3.3.2.5	<i>Rule of Law (RL)</i>	22
3.3.2.6	<i>Control of Corruption (CC)</i>	22
3.3.3	Variabel Kontrol	23
3.3.3.1	Pendapatan Per Kapita.....	23
3.3.3.2	Keterbukaan Perdagangan (<i>Trade Openness</i>)	23
3.3.3.3	Struktur Ekonomi	24
3.4	Model Penelitian	25
3.5	Metode Analisis Data	25
3.5.1	Analisis Regresi	26
3.5.1.1	Uji Statistik F (Uji Chow)	26
3.5.1.2	Uji Hausman.....	26
3.5.2	Uji Asumsi Klasik	27
3.5.2.1	Uji Normalitas	27
3.5.2.2	Uji Autokorelasi	28
3.5.2.3	Uji Multikolinearitas	28
3.5.2.4	Uji Heteroskedastisitas	28
3.5.3	Pengujian Hipotesis	29
3.5.3.1	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	29
3.5.3.2	Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)	30
3.5.3.3	Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	31
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1	Pemilihan Metode Estimasi	32
4.1.1	Metode PLS vs Metode FEM	32
4.1.2	Metode FEM vs Metode REM	36
4.1.2.1	<i>Hausman Test</i>	37
4.2	Uji Asumsi Klasik	38
4.2.1	Uji Normalitas	38
4.2.2	Uji Autokorelasi	39
4.2.3	Uji Multikolinearitas	40
4.2.4	Uji Heteroskedastisitas	41
4.3	Pengujian Hipotesis	43
4.3.1	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	43
4.3.2	Pengujian Hipotesis pada Masing-masing Variabel Independen	43
4.3.2.1	<i>Voice and Accountability (VA)</i>	44
4.3.2.2	<i>Political Stability (PS)</i>	44
4.3.2.3	<i>Government Effectiveness</i>	45
4.3.2.4	<i>Regulatory Quality (RQ)</i>	45
4.3.2.5	<i>Rule of Law (RL)</i>	45
4.3.2.6	<i>Control of Corruption (CC)</i>	46
4.4	Analisis Pengaruh Masing-masing Variabel Independen terhadap Variabel Dependen	46
4.4.1	Variabel <i>Voice and Accountability (VA)</i>	48

4.4.2 Variabel <i>Political Stability</i> (PS)	49
4.4.3 Variabel <i>Government Effectiveness</i>	49
4.4.4 Variabel <i>Regulatory Quality</i> (RQ)	49
4.4.5 Variabel <i>Rule of Law</i> (RL)	50
4.4.6 Variabel <i>Control of Corruption</i> (CC).....	50
4.5 Ikhtisar Hasil Pembahasan	50
V. SIMPULAN DAN SARAN	52
5.1 Simpulan	52
5.2 Implikasi	53
5.3 Keterbatasan Penelitian	54
5.4 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Hasil Regresi dengan Menggunakan Metode PLS.....	32
Tabel 4.2 Hasil Regresi dengan Menggunakan Metode FEM	34
Tabel 4.3 Hasil Regresi dengan Menggunakan Metode REM	36
Tabel 4.4 Hasil Uji Model Menggunakan <i>Hausman Test</i>	38
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Variabel	39
Tabel 4.6 Nilai Durbin Watson Hasil Regresi Metode Fixed Effect dengan White-Test	39
Tabel 4.7 Tabel <i>Correlation Matrix</i> antar Variabel Independen.....	41
Tabel 4.8 Hasil Regresi Metode <i>Fixed Effect</i> dengan <i>White-Test</i>	42
Tabel 4.9 Koefisien Determinasi Hasil Regresi Metode Fixed Effect dengan White-Test.....	43
Tabel 4.10 Hasil Akhir Regresi Metode <i>Fixed Effect</i> dengan <i>White-Test</i>	47
Tabel 4.11 Tabel Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen TR.....	48
Tabel 4.12 Tabel Analisis Rangkuman Hasil Olahan Model	51

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Tren Penerimaan Pajak pada Beberapa Kawasan di Dunia .	4
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:

1. Daftar Negara Sampel
2. Sumber Data

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kualitas tata kelola (*governance*) akan mempengaruhi penerimaan pajak. Hipotesis dibangun untuk menduga pengaruh enam dimensi tata kelola (*governance*) terhadap penerimaan pajak. *Worldwide Governance Indicators* yang meliputi enam dimensi, yakni *voice and accountability, political stability and absence of violence, government effectiveness, regulatory quality, rule of law, dan control of corruption* digunakan untuk mengukur tata kelola (*governance*).

Tidak seperti studi sebelumnya yang terkonsentrasi pada satu atau beberapa aspek tata kelola (*governance*), penelitian ini menyelidiki pengaruh semua indikator tata kelola (*governance*), sehingga dapat meningkatkan pemahaman tentang hubungan tata kelola (*governance*) terhadap penerimaan pajak.

Jika pemerintah berkeinginan meningkatkan penerimaan pajak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warganya, maka pemerintah tersebut perlu memperbaiki tata kelola (*governance*) dalam menjalankan pemerintahannya. Pemberantasan korupsi dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dapat lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan merubah struktur ekonomi di masyarakat dalam usaha tersebut.

Kontribusi utama dari penelitian ini adalah memperluas model konvensional determinan penerimaan pajak. Penerimaan pajak bukan hanya dipengaruhi oleh faktor pada sisi penawaran (*supply side*), tapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor pada sisi permintaan (*demand side*). Faktor-faktor pada sisi penawaran (*supply side*) penerimaan pajak terkait dengan basis pajak (*tax base*), seperti pendapatan per kapita, komposisi ekonomi, dan aktivitas ekonomi. Kebanyakan studi yang ada menekankan pada faktor-faktor tersebut untuk meningkatkan penerimaan pajak pada negara berkembang (Bird, Martinez, dan Torgler, 2008).

Mengingat fokus penelitian pada pengaruh faktor-faktor pada sisi permintaan (*demand side*), maka pengaruh faktor-faktor pada sisi permintaan (*demand side*) perlu untuk dikontrol. Variabel kontrol pada penelitian ini adalah pendapatan per kapita, keterbukaan perdagangan (*trade openness*), dan struktur ekonomi yang diproksikan dengan kontribusi sektor pertanian terhadap GDP. Ketiga variabel tersebut dipilih karena pengaruhnya yang konsisten terhadap penerimaan pajak pada beberapa penelitian terdahulu.

Pendapatan per kapita merupakan indikator level pembangunan sebuah negara. Negara maju selalu diasosiasikan dengan negara yang memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Semakin maju sebuah negara, maka kemampuan untuk membayar dan mengumpulkan pajak juga semakin tinggi (Bahl, 1971). Sebaliknya, pendapatan per kapita yang relatif rendah menjadi hambatan bagi negara berkembang untuk menghimpun penerimaan pajak lebih banyak.

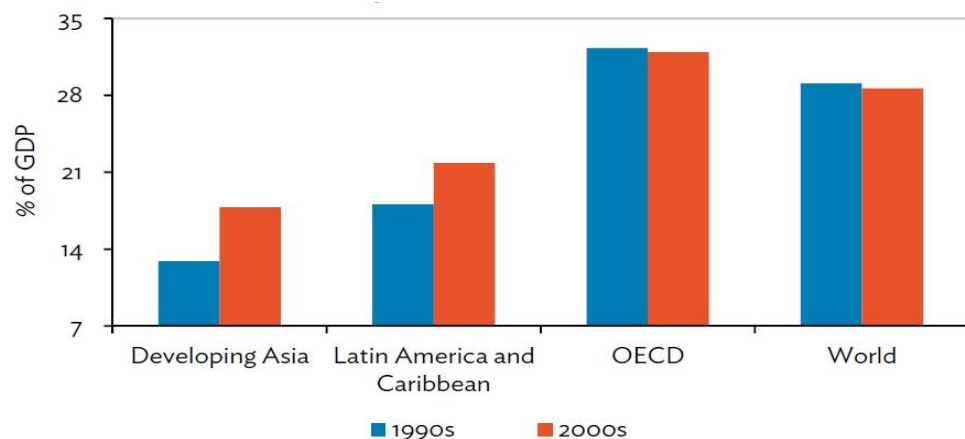
Keterbukaan perdagangan (*trade openness*) juga mempengaruhi penerimaan pajak pada suatu negara. Pajak atas kegiatan penyerahan barang atau perdagangan seringkali menjadi sumber penerimaan pajak yang utama pada negara berkembang karena sifatnya yang lebih mudah untuk dihimpun dibandingkan dengan pajak penghasilan (Bird, Vazquez, dan Torgler, 2008). Kegiatan ekspor dan impor juga lebih mudah untuk dihimpun pajaknya karena sifat kegiatannya yang dilakukan pada lokasi yang spesifik (Gupta, 2007).

Komposisi struktur ekonomi dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Bird, Vazquez, dan Torgler (2008) menyebutkan bahwa semakin besar komposisi sektor non pertanian dalam perekonomian, semakin tinggi pula *tax to GDP ratio*. Hal ini dikarenakan sulitnya untuk memajaki keluaran domestik (*domestic output*) terkait kegiatan pertanian. Penghasilan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian umumnya kecil dan sifatnya subsisten (Gupta, 2007). Lagipula, beberapa negara berkembang juga memberikan subsidi dan kebebasan pajak bagi sektor pertanian di negara mereka.

Faktor-faktor pada sisi permintaan (*demand side*) penerimaan pajak terkait dengan institusi pemerintah yang melakukan pemungutan pajak. Negara-negara berkembang memiliki penerimaan pajak yang rendah karena masih berkuat dengan hambatan institusional dalam proses menghimpun pajak, termasuk di dalamnya masalah korupsi. Kondisi ini terjadi di negara-negara Sub Sahara Afrika (Ghura, 1998), Amerika Latin (Bird, Vazquez, dan Torgler, 2008) dan ASEAN (Syadullah dan Wibowo, 2015). Masalah utama lainnya adalah ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik ditandai dengan kebijakan pemerintah yang tidak

konsisten dan berubah-ubah, sehingga menghalangi reformasi jangka panjang dalam sistem perpajakan (Ajaz dan Ahmed, 2010).

Brondolo, Silvani, Borgne, dan Bosch (2008) menyebutkan administrasi perpajakan dan reformasi sistem perpajakan sebagai dua komponen utama dalam usaha suatu negara menghimpun pajak. Kedua usaha tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dengan mengurangi korupsi dan penghindaran pajak. Korupsi sebagai faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak pernah dibuktikan oleh Imam dan Jacobs (2007), bersama faktor lain, seperti pendapatan per kapita, kontribusi sektor pertanian terhadap GDP, keterbukaan perdagangan, dan inflasi. Gupta (2007) juga menemukan bahwa selain faktor-faktor ekonomi seperti pendapatan per kapita, kontribusi sektor pertanian terhadap GDP, dan utang luar negeri, penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh variabel-variabel institusional seperti korupsi dan stabilitas politik. Lebih lanjut, studi dari Mukhlis, Sugeng, dan Yuli (2014) menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh keadilan, pemberantasan korupsi di sektor perpajakan, dan bagaimana pendapatan pajak dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat.



Gambar 1.1 Tren Penerimaan Pajak pada Beberapa Kawasan di Dunia

Layaknya negara berkembang lain, masalah institusional dalam pemungutan pajak yang berimbas pada rendahnya penerimaan pajak juga dialami oleh sebagian besar negara Asia. Negara berkembang di Asia cenderung memiliki penerimaan pajak yang lebih rendah, baik relatif terhadap GDP maupun potensi penerimaan pajak, jika dibandingkan dengan kawasan lain (lihat Gambar 1.1). Rata-rata penerimaan pajak di negara berkembang Asia kurang dari setengah negara anggota *Organization for Economic Cooperation dan Development* (OECD) pada tahun 1990an, meskipun selisihnya sedikit berkurang pada tahun 2000an (Abdon, Estrada, Lee, dan Park, 2014).

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap hubungan antara tata kelola (*governance*) dengan tingkat penerimaan pajak pada negara-negara yang berada di kawasan Asia yang kemudian dapat dijabarkan dalam judul penelitian **"Analisis Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Government Governance*) terhadap Tingkat Penerimaan Pajak"**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Government Governance*) Berpengaruh terhadap Tingkat Penerimaan Pajak?

1.3. Pembatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan data *World Development Indicator* dan *Worldwide Governance Indicator* dari Bank Dunia serta data *tax ratio* dari *International Monetary Fund*.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) terhadap tingkat penerimaan pajak.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan didapatkan dari penelitian ini adalah.

1. Manfaat Teori

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi sebagai acuan dalam meneliti pengaruh tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) terhadap tingkat penerimaan pajak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi hubungan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) terhadap tingkat penerimaan pajak, sehingga Pemerintah terkait dapat mengambil langkah yang tepat dalam menjalankan pemerintahan sesuai prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai hubungan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) terhadap tingkat penerimaan pajak, sehingga memperkaya wawasan Pemerintah dalam menjalankan pemerintahan sesuai prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).

BAB II

KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Hubungan keagenan lahir dari dua (atau lebih) pihak, dimana salah satu pihak, agen, bertindak mewakili pihak lain, prinsipal, dalam mengambil keputusan atas masalah tertentu (Ross, 1973). Dalam konteks bernegara, hubungan rakyat dan pemerintah eksekutif dapat disebut sebagai hubungan prinsipal dan agen. Pemerintah eksekutif, sebagai agen, bertindak mengalokasikan sumber daya melalui instrumen anggaran pendapatan dan belanja. Rakyat, sebagai prinsipal, mempercayakan pajak yang dibayarkannya untuk dikelola pemerintah eksekutif sebagai agen.

Pemerintah selaku agen tentunya harus menerapkan *good governance* (tata kelola yang baik) dalam menjalankan roda pemerintahannya. UNDP (2006) menyebutkan lima prinsip *good governance*, yakni legitimasi dan hak berpendapat, transparansi dan akuntabilitas, kinerja, dan keadilan.

2.1.2 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Government Governance*)

Model tata kelola (*governance model*) pemerintahan dicirikan oleh perubahan dalam peran pemerintah dari satu-satunya “pemain” menjadi satu dari banyak “pemain”. Tata kelola pemerintahan (*governance*) ditandai dengan perubahan peran pemerintah di masyarakat, dimana aktor non pemerintah, seperti

warga negara dan LSM, berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan dan prinsip-prinsip demokrasi diaplikasikan dengan memberikan masyarakat hak untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan (Denhardt dan Denhardt, 2007).

Oleh Riddell (2009), tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah untuk membangun proses manajemen publik yang efisien, efektif, dan akuntabel, yang terbuka terhadap partisipasi masyarakat sehingga dapat memperkuat sistem demokrasi pemerintahan. Organisasi internasional menganggap tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan syarat bagi perkembangan ekonomi dan upaya untuk melawan korupsi. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dicirikan dengan adopsi prinsip-prinsip demokratis oleh pemerintah, seperti transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembuatan keputusan (Kosack dan Fung, 2014).

Menurut Neumayer (2002), tata kelola pemerintahan (*governance*) adalah cara pembuat keputusan diberdayakan untuk membuat keputusan, suatu cara kebijakan dirumuskan dan diimplementasikan serta tingkat dimana intervensi pemerintah diperbolehkan untuk melanggar hak-hak warga negara. Jadi, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah standar yang digunakan untuk menentukan kualitas pemerintahan oleh suatu negara dan institusi internasional yang memberikan saran dan dukungan politik, administratif, dan keuangan kepada negara lain. Institusi keuangan internasional, seperti IMF dan Bank Dunia, serta negara donor, seperti Amerika Serikat dan Inggris, juga menggunakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai standar untuk mengevaluasi sistem dan urusan negara penerima donor. Hasil

evaluasi tersebut akan menentukan apakah bantuan akan diberikan kepada negara tersebut atau tidak (Santiso, 2001).

Untuk keperluan tersebut, indeks yang mengukur kualitas tata kelola pemerintahan (*governance*) perlu untuk dibangun. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa indeks yang dibangun berdasarkan struktur dan perhitungan yang berbeda (Arndt dan Oman, 2006). Beberapa indeks dibangun berdasarkan karakteristik regional, seperti indeks yang digunakan untuk mengukur tata kelola pemerintahan (*governance*) pada negara-negara Afrika, sedangkan indeks lain dapat digunakan lintas tahun yang meliputi banyak negara.

Suatu indeks dapat dibuat untuk mengukur kualitas tata kelola pemerintahan (*governance*) dengan memfokuskan kepada satu atau dua aspek dari proses pemerintahan. Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perceptions Index*) misalnya, yang hanya mengukur tingkat korupsi di suatu negara. Arndt dan Oman (2006) berpendapat bahwa meskipun indeks tata kelola pemerintahan (*governance*) yang sempurna tidak akan pernah ada, beberapa indeks memiliki validitas dan kredibilitas lebih dibandingkan dengan indeks lain. Jumlah sumber yang digunakan untuk membangun sebuah indeks, kelengkapan proses pemerintahan yang dicakup, serta akurasi hasilnya merupakan faktor-faktor yang membuat sebuah indeks menjadi lebih kredibel dibandingkan indeks lainnya (Arndt dan Oman, 2006).

Tidak seperti indeks yang ada sebelumnya, *Worldwide Governance Indicators* (WGI) mencoba memberikan suatu indeks yang lebih komprehensif dan mencakup lebih banyak negara. Indeks dari WGI mencoba menilai setiap aspek dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sehingga peneliti dan pembuat

kebijakan memiliki pemahaman yang lebih terhadap proses politik yang ada (Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi, 2009). Sifat WGI yang mengagregasikan semua indikator tunggal yang relevan dari berbagai sumber juga dapat mengurangi pengaruh dari kesalahan pengukuran (*measurement error*) yang ada pada tiap pengukuran tunggal (Kaufmann dan Kraay, 2008).

WGI dibangun berdasarkan penelitian Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi (2010), dimana tata kelola pemerintahan (*governance*) dideskripsikan ke dalam tiga kelompok indikator. Pertama, proses bagaimana pemerintah dipilih, dipantau, dan diganti. Kelompok pertama ini terdiri atas dua indikator, yakni *Voice and Accountability* (VA) dan *Political Stability* (PS). Kedua, kapasitas pemerintah untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang baik secara efektif. Indikator *Government Effectiveness* (GE) dan *Regulatory Quality* (RQ) masuk pada kelompok ini. Terakhir, penghormatan kepada warga negara dan institusi pemerintah yang mengatur interaksi ekonomi dan sosial. Kelompok ini berisi indikator *Rule of Law* (RL) dan *Control of Corruption* (CC).

2.1.2.1 *Voice and Accountability* (VA)

Indikator VA mengagregasikan berbagai indikator yang mengukur beragam aspek proses politik, kebebasan sipil dalam berekspresi dan berkumpul, serta transparansi dalam proses pemerintahan. Indikator-indikator tersebut mengukur sejauh mana warga negara dapat berpartisipasi dalam pemilihan pejabat pemerintahan. Indikator VA juga mengagregasikan tiga indikator yang mengukur independensi pers. Kebebasan pers penting untuk diukur karena peran pentingnya dalam memantau jalannya pemerintahan dan menjaga akuntabilitas pemerintahan.

Indikator VA dibangun berdasarkan data yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit (EIU), Freedom House (FH), Political Risk Services (PRS), World Development Report (WDR), Political Economic Risk Consultancy (PERC), dan The World Competitiveness Yearbook (WCY).

2.1.2.2 Political Stability (PS)

Indikator PS mengukur kemungkinan pemerintah akan stabil atau akan adanya penggulingan dengan cara yang inkonstitusional atau dengan kekerasan. Indikator PS mengagregasikan berbagai indikator yang mengukur beragam aspek stabilitas pemerintahan, seperti unjuk rasa besar, pemberontakan, kudeta militer, terorisme, pembunuhan politik (*political assassination*), perang saudara, konflik bersenjata, dan fraksionalisasi SARA.

Indikator PS dibangun berdasarkan data yang dirilis oleh Standard and Poor's DRI (DRI), The Economist Intelligence Unit (EIU), Political Risk Services (PRS), World Development Report (WDR), Business Environment Risk Intelligence (BERI), The Wall Street Journal Central European Economic Review (CEER), Global Competitiveness Survey (GCS), dan Global Competitiveness Survey Africa (GCSA).

2.1.2.3 Government Effectiveness (GE)

Indikator GE mengukur kualitas layanan publik, kualitas pegawai pemerintah dan tingkat independensi mereka dari tekanan politik, kualitas perumusan dan implementasi kebijakan, dan kredibilitas komitmen pemerintah atas kebijakannya. Indikator GE mengagregasikan berbagai indikator yang mengukur aspek-aspek seperti efisiensi kepatenan, kondisi jalan, efisiensi

pengiriman dokumen, kualitas pelayanan kesehatan, desentralisasi, hingga pemborosan anggaran pemerintah.

Indikator GE dibangun berdasarkan data yang dirilis oleh Standard and Poor's DRI (DRI), The Economist Intelligence Unit (EIU), Political Risk Services (PRS), World Development Report (WDR), Business Environment Risk Intelligence (BERI), Freedom House (FH), Global Competitiveness Survey (GCS), Global Competitiveness Survey Africa (GCSA), dan The World Competitiveness Yearbook (WCY).

2.1.2.4 Regulatory Quality (RQ)

Indikator RQ mengukur kemampuan pemerintah merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang baik dan regulasi yang mengizinkan dan memajukan perkembangan sektor swasta. Indikator RQ mengagregasikan berbagai indikator yang mengukur aspek-aspek seperti kontrol terhadap harga dan upah, aturan investasi asing, regulasi perbankan, regulasi ekspor impor, pembatasan usaha, dan kebijakan persaingan usaha.

Indikator RQ dibangun berdasarkan data yang dirilis oleh Heritage Foundation/Wall Street Journal (HFWSJ), European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Standard and Poor's DRI (DRI), World Development Report (WDR), dan Business Environment Risk Intelligence (BERI), Freedom House (FH), Global Competitiveness Survey (GCS), Global Competitiveness Survey Africa (GCSA), dan The World Competitiveness Yearbook (WCY).

2.1.2.5 Rule of Law (RL)

Indikator RL mengukur sejauh mana agen yakin dan patuh terhadap aturan yang ada di masyarakat, khususnya kualitas penegakan kontrak, hak kepemilikan,

kepolisian, pengadilan, dan juga kemungkinan kejahatan dan kekerasan. Indikator RL mengagregasikan berbagai indikator yang mengukur beragam aspek terkait penegakan hukum, seperti biaya yang ditimbulkan oleh suatu aksi kejahatan, penculikan yang dilakukan penculikan terhadap warga asing, tindak korupsi perbankan, pasar gelap (*black market*), tingkat *tax evasion*, efektivitas kepolisian, dan biaya yang ditimbulkan oleh organisasi kriminal terhadap bisnis.

Indikator RL dibangun berdasarkan data yang dirilis oleh Standard and Poor's DRI (DRI), The Economist Intelligence Unit (EIU), Heritage Foundation/Wall Street Journal (HFWSJ), Political Risk Services (PRS), World Development Report (WDR), Business Environment Risk Intelligence (BERI), The Wall Street Journal Central European Economic Review (CEER), Freedom House (FH), Global Competitiveness Survey (GCS), Global Competitiveness Survey Africa (GCSA), dan The World Competitiveness Yearbook (WCY).

2.1.2.6 Control of Corruption (CC)

Indikator CC mengukur sejauh mana kekuasaan publik digunakan untuk kepentingan privat, termasuk korupsi berbentuk kecil dan besar, dan juga peran elit dan kepentingan privat. Konsep yang diukur oleh indikator ini antara lain korupsi pada pegawai publik, korupsi sebagai ancaman bagi investasi asing, korupsi sebagai penghalang bagi bisnis, frekuensi penggunaan "uang pelicin", jumlah kasus korupsi, hingga praktik-praktik yang tidak tepat pada pelayanan publik.

Indikator CC dibangun berdasarkan data yang dirilis oleh Transparency International Global Corruption Barometer Survey (TI), Global Integrity Index (GII), Standard and Poor's DRI (DRI), The Economist Intelligence Unit (EIU),

Political Risk Services (PRS), World Development Report (WDR), Business Environment Risk Intelligence (BERI), The Wall Street Journal Central European Economic Review (CEER), Freedom House (FH), Gallup International, Political Economic Risk Consultancy (PERC), Global Competitiveness Survey (GCS), Global Competitiveness Survey Africa (GCSA), dan The World Competitiveness Yearbook (WCY).

2.1.3. Determinan Penerimaan Pajak

Pajak sebagai salah satu bentuk penerimaan pada suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor. Secara umum, berbagai faktor tersebut dapat dibedakan ke dalam faktor pada sisi penawaran (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*). Faktor-faktor pada sisi penawaran (*supply side*) penerimaan pajak terkait dengan basis pajak (*tax base*), seperti pendapatan per kapita, komposisi ekonomi, dan aktivitas ekonomi. Sedangkan faktor-faktor pada sisi permintaan (*demand side*) penerimaan pajak terkait dengan institusi pemerintah yang melakukan pemungutan pajak.

Studi awal terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak kebanyakan menyelidiki peran faktor-faktor pada sisi penawaran (*supply side*). Lotz dan Morss (1967) yang menyelidiki pengaruh keterbukaan perdagangan dan pendapatan per kapita terhadap penerimaan pajak yang diproksikan dengan *tax ratio* menyimpulkan bahwa kedua variabel penjelas yang ditelitinya berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Shin (1969) menemukan bahwa porsi sektor pertanian terhadap GDP berpengaruh negatif terhadap *tax ratio*, bersama-sama dengan faktor lain seperti keterbukaan perdagangan dan pendapatan per kapita yang berpengaruh positif.

Hal yang sama juga menjadi temuan Bahl (1971) dan Piancastelli (2001) yang melakukan penelitiannya terhadap negara-negara berkembang serta Stotsky dan WoldeMariam (1997) yang melakukan penelitiannya terhadap 43 negara Sub Sahara Afrika.

Pada era milenium, penelitian terhadap determinan penerimaan pajak mulai meluas ke faktor-faktor pada sisi permintaan (*demand side*) yang terkait dengan institusi pemerintah yang melakukan pemungutan pajak. Castro dan Camarillo (2014) menyebutkan pendapatan per kapita, kontribusi sektor industri, dan stabilitas sosial dan ekonomi (yang diasosiasikan dengan kebebasan sipil) sebagai faktor yang berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Sedangkan Bird, Vazquez, dan Torgler (2008) dan Syadullah dan Wibowo (2015) menemukan bahwa akuntabilitas, bersama-sama dengan hak berpendapat dan tingkat korupsi merupakan faktor-faktor institusional yang turut mempengaruhi penerimaan pajak, selain faktor-faktor ekonomi seperti pendapatan per kapita, keterbukaan perdagangan, dan kontribusi sektor pertanian terhadap GDP. Kondisi ini terjadi pada negara berkembang dan juga negara berpendapatan tinggi.

Korupsi sebagai faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak pernah diteliti oleh Ahsan dan Wu (2005). Mengambil obyek negara maju dan negara berkembang dalam kurun 1979 – 2002, ditemukan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap *tax ratio*. Dua tahun kemudian, Imam dan Jacobs (2007), menemukan pengaruh korupsi terhadap penerimaan pajak, bersama faktor lain, seperti pendapatan per kapita, kontribusi sektor pertanian terhadap GDP, keterbukaan perdagangan, dan inflasi.

Gupta (2007) juga menemukan bahwa selain faktor-faktor ekonomi seperti pendapatan per kapita per kapita, kontribusi sektor pertanian terhadap GDP, dan utang luar negeri, penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh variabel-variabel institusional seperti korupsi dan stabilitas politik. Lebih lanjut, studi dari Mukhlis, Sugeng, dan Yuli (2014) menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh keadilan, pemberantasan korupsi di sektor perpajakan, dan bagaimana pendapatan pajak dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pengaruh tata kelola (*governance*) terhadap penerimaan pajak telah beberapa kali diteliti. Awalnya, aspek tata kelola (*governance*) yang diteliti adalah korupsi. Ghura (1998), Ahsan dan Wu (2005), Imam dan Jacobs (2007), Gupta (2007), Bird, Vazquez, dan Torgler (2008), Mukhlis, Sugeng, dan Yuli (2014), dan Syadullah dan Wibowo (2015) menemukan korupsi berpengaruh negatif terhadap *tax ratio*.

Penelitian selanjutnya mulai meneliti aspek tata kelola (*governance*) yang lain. Castro dan Camarillo (2014) menemukan stabilitas sosial dan ekonomi (yang diasosiasikan dengan kebebasan sipil) sebagai faktor yang berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Sedangkan Bird, Vazquez, dan Torgler (2008) menemukan bahwa aspek *voice and accountability* mempengaruhi kemauan masyarakat dalam membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Syadullah dan Wibowo (2015) dapat dikatakan sebagai penelitian yang mengukur pengaruh seluruh aspek tata kelola (*governance*) sesuai indikator yang dibangun oleh Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi. Syadullah dan Wibowo mengukur pengaruh enam proksi sebagai

indikator tata kelola (*governance*), yang meliputi *voice and accountability*, *political stability and absence of violence*, *government effectiveness*, *regulatory quality*, *rule of law*, dan *control of corruption*, dalam pengaruhnya terhadap penerimaan pajak pada negara-negara ASEAN.

Syadullah dan Wibowo (2015) menemukan variabel *voice and accountability*, *political stability and absence of violence*, dan *control of corruption* memberikan efek negatif terhadap penerimaan pajak. Variabel *regulatory quality* dan *rule of law* berdampak positif terhadap penerimaan pajak. Sedangkan variabel *government effectiveness* tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada negara-negara ASEAN.

2.3 Hipotesis

Tata kelola yang baik (*good governance*) akan menghasilkan sistem perpajakan yang memadai, meningkatkan administrasi perpajakan, kebijakan makroekonomi yang lebih baik, sehingga menghasilkan penerimaan yang lebih banyak (Ajaz dan Ahmed, 2010). Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi (2003) menemukan bahwa bagaimana institusi pemerintahan dikelola berpengaruh terhadap moral pajak (*tax morale*) masyarakat.

Ehrhart (2009) menemukan bahwa rezim politik pada suatu negara mempengaruhi implementasi reformasi pajak dan pencapaian penerimaan pajak yang lebih tinggi. Demokrasi berpengaruh cukup besar terhadap pencapaian penerimaan pajak tersebut.

H1: Tingkat *voice and accountability* berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak

Political stability mempengaruhi kinerja penerimaan pajak (Gupta, 2007; Syadullah dan Wibowo, 2015). Ketidakstabilan politik dapat pula menghalangi reformasi jangka panjang dalam sistem perpajakan (Ajaz dan Ahmed, 2010).

H2: Tingkat *political stability* berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak

Penyediaan barang publik melalui belanja Pemerintah dapat pula meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat (Alm, McClelland, dan Schulze, 1992). Masyarakat mau membayar pajak karena mereka mengapresiasi barang publik yang disediakan oleh Pemerintah. Masyarakat menyadari bahwa pajak yang mereka bayarkan dibutuhkan untuk membiayai penyediaan barang publik tersebut (Fjeldstad, 2001).

H3: Tingkat *government effectiveness* berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak

Menurut studi *International Tax Compact* (2010), *tax evasion* dan *tax avoidance* pada negara berkembang disebabkan oleh lemahnya peraturan perpajakan. Lebih lanjut, kualitas rumusan dan implementasi aturan hukum juga berpengaruh positif terhadap *tax ratio* (Syadullah dan Wibowo, 2015).

H4: Tingkat *regulatory quality* berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak

Benno (2003) menemukan bahwa hak masyarakat dalam demokrasi serta kepercayaan kepada pemerintah dan sistem hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap moral pajak (*tax morale*).

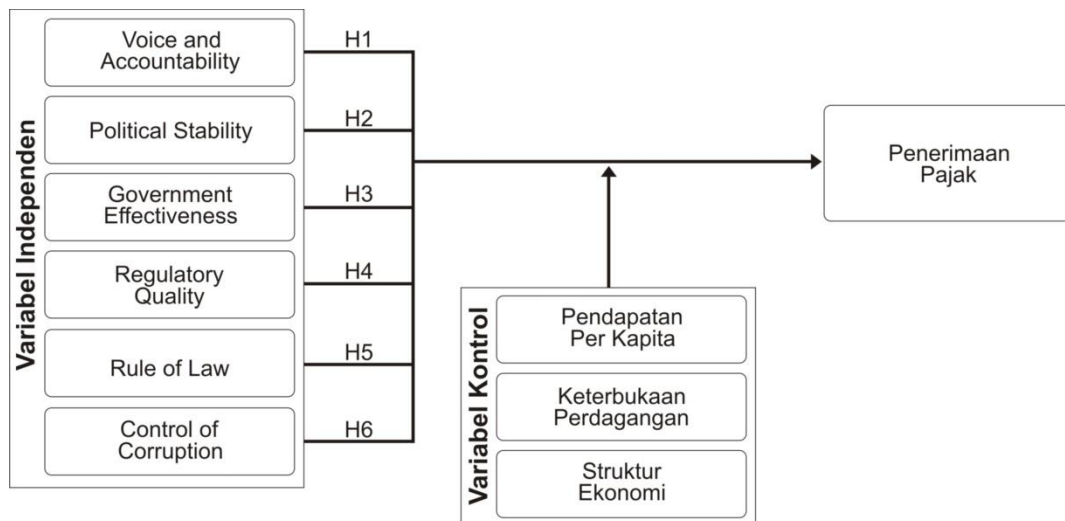
H5: Tingkat *rule of law* berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak

Korupsi di tubuh pemerintah sebagai institusi yang berwenang memungut pajak dan membelanjakannya mempengaruhi penerimaan pajak secara negatif (Ahsan dan Wu, 2005).

H6: Tingkat *control of corruption* berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian teori yang ada, maka dapat dibuat suatu kerangka pemikiran terhadap tingkat indikator tata kelola (*governance*) serta pengaruhnya terhadap tingkat penerimaan pajak dengan pendapatan per kapita, keterbukaan perdagangan, dan struktur ekonomi sebagai variabel kontrol.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa *World Development Indicator* dan *Worldwide Governance Indicator* dari Bank Dunia serta data *tax ratio* dari *International Monetary Fund*.

3.2 Populasi dan Sampel

Sampel dipilih dari populasi negara yang ada di Benua Asia yang disurvei dalam *Worldwide Governance Indicator* serta terdapat datanya dalam *World Development Indicator* dan *International Monetary Fund Data*. Terdapat 37 negara yang menjadi sampel pada penelitian ini. Dengan mengambil data pada kurun 13 tahun terakhir (2002–2014), *dataset* yang terbentuk adalah *panel data* dengan jumlah observasi 481.

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.3.1 Variabel Dependen

Tingkat penerimaan pajak yang digunakan dalam penelitian ini diukur dengan *tax to GDP ratio*. Rumus untuk mengukur *tax to GDP ratio* yaitu.

$$TR = \text{Penerimaan Pajak} / \text{GDP}$$

3.3.2 Variabel Independen

Skor tata kelola (*governance*) untuk tiap negara diperoleh dari *Worldwide Governance Indicators* (WGI) yang dirilis oleh Bank Dunia. WGI dianggap sebagai perangkat yang paling komprehensif untuk menilai tata kelola (*governance*) (Arndt dan Oman, 2006). WGI meliputi enam indikator yang mewakili aspek-aspek dalam proses tata kelola (*governance*), yakni *voice and accountability* (VA), *political stability and absence of violence* (PS), *government effectiveness* (GE), *regulatory quality* (RQ), *rule of law* (RL), dan *control of corruption* (CC) (Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi, 2009). Keenam indikator tersebut didasarkan atas ratusan variabel yang diperoleh dari 31 sumber data yang berbeda, baik dari laporan survei responden, lembaga swadaya masyarakat, penyedia informasi bisnis komersial, dan organisasi sektor publik dunia. Skor tata kelola (*governance*) untuk masing-masing indikator yang semula berada pada skala -2,5–2,5 kemudian dikonversi ke dalam skala 0–100 pada penelitian ini.

3.3.2.1 *Voice and Accountability*

Variabel *voice and accountability* (VA) mengukur berbagai aspek dari proses politik, kebebasan sipil, dan hak politik masyarakat (Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi, 2009).

VA = Skor *voice and accountability* dari WGI

3.3.2.2 *Political Stability and Absence of Violence*

Variabel *political stability and absence of violence* (PS) mengukur kemungkinan perubahan dalam kekuasaan yang dapat berdampak bukan hanya kepada keberlanjutan kebijakan tetapi juga mengurangi kesempatan warga negara

untuk memilih dan mengganti penguasa dengan damai (Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi, 2009).

PS = Skor *political stability and absence of violence* dari WGI

3.3.2.3 Government Effectiveness

Variabel *government effectiveness* (GE) mengukur kemampuan suatu pemerintahan untuk menyediakan barang publik dan menghasilkan serta menerapkan kebijakan yang baik (Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi, 2009).

GE = Skor *government effectiveness* dari WGI

3.3.2.4 Regulatory Quality

Variabel *regulatory quality* (RQ) mengukur kualitas peraturan yang dikeluarkan oleh suatu pemerintahan (Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi, 2009).

RQ = Skor *regulatory quality* dari WGI

3.3.2.5 Rule of Law

Variabel *rule of law* (RL) mengukur keberhasilan pemerintah dalam membangun lingkungan yang adil dan aturan yang dapat diprediksi (Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi, 2009).

RL = Skor *rule of law* dari WGI

3.3.2.6 Control of Corruption

Variabel *control of corruption* (CC) mengukur keberadaan korupsi yang dimanifestasikan oleh kurangnya penghargaan kepada hukum oleh penyuap (biasanya warga masyarakat atau korporasi) dan pihak yang disuap (biasanya pejabat publik atau politisi) (Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi, 2009).

CC = Skor *control of corruption* dari WGI

3.3.3 Variabel Kontrol

Penelitian ini berfokus untuk mempelajari pengaruh faktor pada sisi permintaan (*demand side*) penerimaan pajak. Untuk itu, faktor-faktor pada sisi penawaran (*supply side*) penerimaan pajak yang terkait dengan basis pajak (*tax base*) perlu untuk dikontrol pengaruhnya. Variabel kontrol pada penelitian ini adalah pendapatan per kapita, keterbukaan perdagangan (*trade openness*), dan struktur ekonomi yang diproksikan dengan kontribusi sektor pertanian terhadap GDP.

3.3.3.1 Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita merupakan indikator level pembangunan sebuah negara. Semakin maju sebuah negara, maka kemampuan untuk membayar dan mengumpulkan pajak juga semakin tinggi (Bahl, 1971). Penelitian Lotz dan Morss (1967), Shin (1969), Bahl (1971), Stotsky dan WoldeMariam (1997), Piancastelli (2001), dan Gupta (2007) menemukan adanya hubungan positif antara pendapatan per kapita dan penerimaan pajak.

Secara istilah, pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita juga direfleksikan oleh GDP per kapita. Pendapatan per kapita diukur dengan rumus.

$$PPK = \text{GDP} / \text{Jumlah Penduduk}$$

3.3.3.2 Keterbukaan Perdagangan (*Trade Openness*)

Pajak atas kegiatan penyerahan barang atau perdagangan seringkali menjadi sumber penerimaan pajak yang utama pada negara berkembang karena sifatnya yang lebih mudah untuk ditarik dibandingkan dengan pajak penghasilan (Bird, Vazquez, dan Torgler, 2008). Kegiatan ekspor dan impor juga lebih mudah

untuk dihimpun pajaknya karena sifat kegiatannya yang dilakukan pada lokasi yang spesifik (Gupta, 2007). Lotz dan Morss (1967), Shin (1969), Bahl (1971), Stotsky dan WoldeMariam (1997), Piancastelli (2001), dan Ahsan dan Wu (2005) menemukan hubungan positif antara keterbukaan perdagangan dan penerimaan pajak pada suatu negara.

Proksi keterbukaan perdagangan dihitung dengan rumus.

$$\text{OPEN} = (\text{Ekspor} + \text{Impor}) / \text{GDP}$$

3.3.3.3 Struktur Ekonomi

Komposisi struktur ekonomi dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Bird, Vazquez, dan Torgler (2008) menyebutkan bahwa semakin besar komposisi sektor non pertanian dalam perekonomian, semakin tinggi pula *tax to GDP ratio*. Hal ini dikarenakan sulitnya untuk memajaki keluaran domestik (*domestic output*) terkait kegiatan pertanian. Penghasilan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian umumnya kecil dan sifatnya subsisten (Gupta, 2007). Lagipula, beberapa negara berkembang juga memberikan subsidi dan kebebasan pajak bagi sektor pertanian di negara mereka.

Hubungan negatif antara porsi sektor pertanian terhadap GDP dan penerimaan pajak pada suatu negara menjadi kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh Shin (1969), Bahl (1971), Stotsky dan WoldeMariam (1997), Piancastelli (2001), Ahsan dan Wu (2005), Gupta (2007), dan Castro dan Camarillo (2014). Variabel struktur ekonomi diukur dengan membandingkan kontribusi sektor pertanian terhadap total GDP, sesuai rumus berikut.

$$\text{AGR} = \text{Kontribusi Sektor Pertanian} / \text{GDP}$$

3.4 Model Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran teoritis yang telah diuraikan sebelumnya, maka model penelitian yang dibentuk adalah sebagai berikut:

$$TR_{i,t} = \alpha + \beta 1 VA_{i,t} + \beta 2 PS_{i,t} + \beta 3 GE_{i,t} + \beta 4 RQ_{i,t} + \beta 5 RL_{i,t} + \beta 6 CC_{i,t} \\ + \beta 7 \log PPK_{i,t} + \beta 8 OPEN_{i,t} + \beta 9 AGR_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

Dimana indeks i menunjukkan sampel negara, indeks t menunjukkan waktu, TR mewakili tingkat *tax to GDP ratio*, VA mewakili tingkat *voice and accountability*, PS mewakili tingkat *political stability and absence of violence*, GE mewakili tingkat *government effectiveness*, RQ mewakili tingkat *regulatory quality*, RL mewakili tingkat *rule of law*, CC mewakili tingkat *control of corruption*, PPK mewakili pendapatan per kapita, OPEN mewakili keterbukaan perdagangan (*trade openness*), dan AGR mewakili kontribusi sektor pertanian terhadap GDP.

3.5 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dengan menggunakan regresi data panel (*panel pooled data*) untuk menganalisis pengaruh *voice and accountability* (VA), *political stability and absence of violence* (PS), *government effectiveness* (GE), *regulatory quality* (RQ), *rule of law* (RL), dan *control of corruption* (CC) terhadap kinerja penerimaan pajak yang diprosikan dengan *tax ratio*. Alat yang akan digunakan untuk pengujian statistik adalah perangkat lunak Eviews 9. Data dimasukkan ke dalam perangkat lunak Microsoft Excel 2010 dalam format .xlsx, lalu diimpor ke dalam perangkat lunak EViews 9 untuk diuji.

3.5.1 Analisis Regresi

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan alat uji Eviews 9. Menurut Nachrowi dan Usman (2006), untuk mengestimasi model regresi data panel dapat digunakan tiga teknik uji regresi diantaranya dengan menggunakan *Ordinary Least Square (OLS)/ common effect, fixed effect* dan *random effect*. Dari ketiga teknik estimasi tersebut akan dipilih salah satu teknik yang paling tepat untuk mengestimasi regresi data panel. Pemilihan tersebut didasarkan atas uji-uji sebagai berikut.

3.5.1.1 Uji Statistik F (Uji Chow)

Uji ini berguna untuk memilih antara model OLS tanpa variabel *dummy (common effect)* dengan model *fixed effect*. Hal ini dilakukan dengan membandingkan antara F_{stat} dengan F_{tabel} , dengan hipotesis H_0 menggunakan model *common effect* dan H_1 menggunakan model *fixed effect*. Nilai F_{stat} akan diperoleh dari hasil uji chow dengan menggunakan aplikasi Eviews 9, Sedangkan F_{tabel} dicari dengan cara menggunakan tabel F, ataupun dengan menggunakan alat bantu Microsoft Excel.

Jika nilai Chow statistik (F_{stat}) $>$ F_{tabel} , maka hipotesis H_0 ditolak yang artinya harus menggunakan model *Fixed Effect*. Dan jika nilai F_{stat} $<$ F_{tabel} , maka hipotesis H_0 diterima, yang artinya model *common effect (OLS)* yang akan digunakan untuk mengestimasi model data panel.

3.5.1.2 Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih antara metode *Fixed Effect* atau metode *Random Effect*. Hipotesis yang dibangun dalam Uji Hausman ini adalah H_0 menggunakan *random effect* dan hipotesis alternatifnya menggunakan model

fixed effect. Statistik Uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik *Chi Square* dengan *degree of freedom* sebanyak k , dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika *Chi Square* hitung lebih tinggi dari *Chi Square* tabel dan *p-value* signifikan maka H_0 ditolak, sehingga metode *Fixed Effect* yang lebih tepat untuk digunakan.

Namun apabila Jika *Chi Square* hitung lebih rendah dari *Chi Square* tabel dan *pvalue* signifikan maka hipotesis H_0 diterima, sehingga metode *Random Effect* lebih tepat digunakan untuk mengestimasi model regresi data panel.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini untuk memastikan bahwa dalam regresi yang digunakan tidak terdapat heteroskedastisitas, multikolinieritas, autokorelasi serta untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan terdistribusi normal.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah persebaran data berdistribusi normal atau tidak. Dimana yang diuji dalam model regresi adalah apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2009). Terdapat beberapa cara yang digunakan dalam pengujian normalitas data ini, pada penelitian ini akan digunakan Uji Jaque Bera dan melihat probabilitasnya dari hasil pengujian sebaran residual. Dengan ketentuan untuk nilai probabilitas H_0 dari uji ini adalah jika nilai probabilitas dibawah α (0,05) maka data terdistribusi normal, sedangkan H_a nya adalah jika probabilitas di atas α , maka data terdistribusi tidak normal.

3.5.2.2 Uji Autokorelasi

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Problem autokorelasi akan muncul jika terjadi korelasi didalamnya. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering muncul pada data runtut waktu karena gangguan populasi cenderung mempengaruhi populasi yang sama pada periode berikutnya.

3.5.2.3 Uji Multikolinieritas

Pengujian ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya hubungan linier antar variabel independen. Salah satu cara untuk melihat ada tidaknya adalah dengan membuat matrik korelasi antar variabel, jika nilai korelasi antar variabel berada pada nilai diatas 0,8 maka ada multikolinieritas. Sebaliknya jika berada dibawah 0,8 maka tidak ada multikolinieritas. Untuk melakukan pengujian ini bisa digunakan perangkat lunak Eviews 9, setelah itu akan didapatkan nilai korelasi antar variabel model. Selanjutnya dianalisis hubungan antar variabel independen, apakah terjadi multikolinieritas atau tidak.

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah pengujian apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Salah satu asumsi yang harus dipenuhi agar taksiran parameter dalam model regresi linier bersifat BLUE maka $var(u_i)$ harus sama dengan σ^2 (konstan), atau dengan kata lain semua residual atau *error* mempunyai varian yang sama atau disebut dengan homoskedastisitas. Sedangkan bila varian tidak konstan atau berubah-ubah disebut dengan heteroskedastisitas (Nachrowi dan Usman, 2006).

3.5.3 Pengujian Hipotesis

Setelah melakukan pengujian untuk memilih diantara ketiga model yang akan digunakan untuk mengestimasi regresi data panel dan melakukan uji asumsi klasik, maka analisis dilanjutkan dengan pengujian hipotesis, diantaranya.

3.5.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi atau R^2 menunjukkan besar distribusi dari variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada diantara nol dan satu. Nilai R^2 kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Bila nilai R^2 mendekati satu menandakan bahwa variabel-variabel independen mendekati hubungan dengan variabel dependen, sehingga pengaruh model tersebut dapat dikatakan benar. Jadi semakin besar nilai R^2 maka semakin bagus garis regresi yang terbentuk dan semakin kecil nilai dari R^2 , maka semakin tidak tepat garis regresi tersebut mewakili data hasil observasi.

Hal ini diperlukan karena dalam suatu penelitian atau observasi, perlu dilihat seberapa jauh model yang terbentuk dapat menerangkan variabel dependennya. Beberapa kegunaan koefisien determinasi adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengukur ketepatan suatu garis regresi yang ditetapkan terhadap kelompok data hasil observasi.

- b. Untuk mengukur proporsi varian dependen yang diterangkan oleh pengaruh linier dari variabel independen.

3.5.3.2 Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} . Apabila t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} maka hipotesis alternatif yang menyatakan suatu variabel independen secara individu mempengaruhi variabel dependen dapat diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Namun jika t_{hitung} lebih rendah dari t_{tabel} maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Selain membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} , uji t juga dapat dilakukan dengan melihat probabilitas yang terdapat dalam keluaran komputer, jika probabilitas pada keluaran komputer di bawah α yang ditentukan maka koefisien regresi dianggap signifikan.

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah *voice and accountability* (VA), *political stability and absence of violence* (PS), *government effectiveness* (GE), *regulatory quality* (RQ), *rule of law* (RL), dan *control of corruption* (CC) secara terpisah (parsial) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen *tax ratio* pada negara-negara Asia.

3.5.3.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas dalam penelitian yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hipotesis yang ingin diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol. Mekanisme yang digunakan untuk menguji hipotesis dari parameter dugaan secara bersama-sama (Uji F-statistik) :

$$\text{Hipotesis: } H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$$

H_a = minimal ada satu parameter dugaan (β) tidak sama dengan nol

$$\alpha = 0,05$$

Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . Bila nilai F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada pengaruh dari seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Namun bila nilai F_{hitung} lebih rendah daripada F_{tabel} maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak ada pengaruh dari seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen berupa enam enam dimensi tata kelola (*governance*) terhadap tingkat penerimaan pajak negara-negara di Benua Asia pada periode 2002–2014. *Worldwide Governance Indicators* yang meliputi enam dimensi, yakni *voice and accountability*, *political stability*, *government effectiveness*, *regulatory quality*, *rule of law*, dan *control of corruption* digunakan untuk mengukur tata kelola (*governance*). Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Variabel *voice and accountability* (VA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax ratio* (TR) negara-negara di Benua Asia. Negara dengan indeks VA yang tinggi cenderung memiliki tingkat penerimaan pajak yang tinggi dibandingkan dengan negara yang memiliki indeks VA lebih rendah.
2. Variabel *control of corruption* (CC) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax ratio* (TR) negara-negara di Benua Asia. Negara dengan indeks CC yang tinggi cenderung memiliki tingkat penerimaan pajak yang tinggi dibandingkan dengan negara yang memiliki indeks CC lebih rendah.
3. Variabel *regulation quality* (RQ) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax ratio* (TR) negara-negara di Benua Asia. Negara dengan indeks RQ yang

tinggi cenderung memiliki tingkat penerimaan pajak yang rendah dibandingkan dengan negara yang memiliki indeks RQ lebih rendah.

4. Variabel *rule of law* (RL) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax ratio* (TR) negara-negara di Benua Asia. Negara dengan indeks RL yang tinggi cenderung memiliki tingkat penerimaan pajak yang rendah dibandingkan dengan negara yang memiliki indeks RL lebih rendah.
5. Variabel *political stability* (PS) dan *government effectiveness* (GE) tidak berpengaruh terhadap *tax ratio* (TR) negara-negara di Benua Asia.
6. Variabel kontrol, yakni pendapatan perkapita, keterbukaan perdagangan, dan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian, mempengaruhi secara positif dan signifikan *tax ratio* (TR) negara-negara di Benua Asia.

5.2 Implikasi

Implikasi dari hasil penelitian mencakup dua hal, yaitu implikasi teoritis dan praktis. Implikasi teoritis berhubungan dengan kontribusinya bagi model determinan penerimaan pajak. Sedangkan implikasi praktis berkaitan dengan kontribusi penelitian terhadap peningkatan kinerja penerimaan pajak pada negara-negara Asia.

1. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa *voice and accountability* (VA) dan *control of corruption* (CC) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax ratio* (TR) negara-negara di Benua Asia. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Bird, Vazquez, dan Torgler (2008) dan Syadullah dan Wibowo (2015). Penerimaan pajak bukan hanya dipengaruhi oleh faktor pada sisi penawaran (*supply side*) yang terkait dengan basis pajak (*tax base*), seperti pendapatan per kapita, komposisi ekonomi, dan aktivitas ekonomi, tapi juga

dipengaruhi oleh faktor-faktor pada sisi permintaan (*demand side*), seperti *voice and accountability* (VA) dan *control of corruption* (CC).

2. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi kebijakan pemerintah negara-negara Asia untuk memperbaiki kualitas institusi pemerintahannya dengan meningkatkan aspek *voice and accountability* (VA) dan *control of corruption* (CC) agar kinerja penerimaan pajaknya turut meningkat. Peningkatan aspek *voice and accountability* (VA) antara lain dapat dilakukan dengan menjamin partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum yang berkualitas serta menjamin kebebasan masyarakat untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Perilaku korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan dapat diberantas dengan memberikan edukasi bahaya perilaku korupsi pada tiap lapisan masyarakat, membangun sistem pengendalian yang baik untuk mencegah dan mendeteksi perilaku korupsi di pemerintahan, serta penegakan hukum secara tegas untuk menindak perilaku korupsi.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Terdapat keterbatasan yang dihadapi penulis dalam penelitian ini, antara lain.

1. Variabel dependen pada penelitian ini masih menggunakan proksi *tax to GDP ratio*, belum mengeksplorasi kemungkinan penggunaan proksi *taxable capacity* ataupun *tax effort* untuk mengukur tingkat penerimaan pajak di suatu negara.
2. Model regresi dalam penelitian ini belum mengakomodasi efek dari variabel dependen yang tertinggal (*lagged dependent variable*). Pengakomodasian variabel dependen yang tertinggal (*lagged dependent variable*) akan

membentuk model data panel yang bersifat dinamis (*Dynamic Panel Data Model/DPDM*).

5.4 Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan penelitian, berikut adalah saran yang dapat diberikan.

1. Faktor tata kelola (*governance*) jelas turut mempengaruhi tingkat penerimaan pajak suatu negara. Kemampuan suatu negara dalam menghimpun penerimaan pajak bergantung kepada seberapa baik institusi pemerintahan yang melakukan pemungutan pajak dan membelanjakannya. Penerimaan pajak dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kualitas tata kelola (*governance*) pemerintahan. Peningkatan kualitas tata kelola (*governance*), seperti peningkatan *voice and accountability* dan pemberantasan korupsi relatif dapat dilakukan lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan merubah struktur perekonomian, seperti kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian dan nilai ekspor dan impor terhadap PDB.
2. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi penggunaan proksi *taxable capacity* ataupun *tax effort* untuk mengukur tingkat penerimaan pajak, selain penggunaan proksi *tax to GDP ratio*. Selanjutnya, dapat pula mengakomodasi variabel dependen yang tertinggal (*lagged dependent variable*) ke dalam model sehingga membentuk model data panel yang bersifat dinamis (*Dynamic Panel Data Model/DPDM*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdon, Arnelyn, G. B. Estrada, Minsoo Lee, dan Donghyun Park. 2014. Fiscal Policy and Growth in Developing Asia. *ADB Economics Working Paper Series* 412.
- Ahsan, S.M. dan S. Wu. 2005. *Tax Structure and Reform in China, 1979 – 2002*. Montreal: Mimeo Department of Economics, Concordia University.
- Ajaz, T. dan Ahmed, E. 2010. The Effect of Corruption and Governance on Tax Revenue. *The Pakistan Development Review* 49 (4): 405–417.
- Alm, J., G. H. McClelland, dan W. D. Schulze. 1992. Why Do People Pay Taxes? *Journal of Public Economics* 48: 21–38.
- Arndt, C., dan C. Oman. 2006. *Uses and Abuses of Governance Indicators*. Paris, France: *Development Centre Studies*. Paris: Organization for Economic Cooperation and Development.
- Bahl, R.W. 1971. A Regression Approach to Tax Effort and Tax Ratio Analysis. *IMF Staff Paper* 18: 570–612.
- Benno, T. 2003. To Evade Taxes or Not to Evade: That is the Question. *Journal of Socio-Economics*: 283–302.
- Bird, Richard M., Jorge Martinez-Vazquez, dan Benno Torgler. 2008. Tax Effort in Developing Countries and High Income Countries: The Impact of Corruption, Voice and Accountability. *Economic Analysis and Policy* 38 (1): 55–71.
- Brondolo, John., Carlos Silvani, Eric Le Borgne, dan Frank Bosch. 2008. Tax Administration Reform and Fiscal Adjustment: The Case of Indonesia (2001– 07). *IMF Working Paper* 129.
- Castro, Angeles Gerardo dan Diana Berenice Ramirez Camarillo. 2014. Determinants of Tax Revenue in OECD Countries Over the Period 2001 – 2011. *Contaduria y Administracion* 59 (3): 35–59.
- Denhardt, J., dan R. Denhardt. 2007. *The New Public Service: Serving, not Steering*. Armonk, NY: M.E. Sharpe.
- Ehrhart, Helene. 2009. Assessing the Relationship between Democracy and Domestic Taxes in Developing Countries. *CERDI Etudes et Documents* 30.
- Fjeldstad, O. H. 2001. Taxation, Coercion and Donors: Local Government Tax Enforcement in Tanzania. *The Journal of Modern African Studies* (39): 289–306.

- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariante dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghura, Dhaneshwar. 1998. Tax Revenue in Sub Saharan Africa: Effects of Economic Policies and Corruption. *IMF Working Paper* 135.
- Gujarati, Damodar N. dan Dawn C. Porter. 2009. *Basic Econometrics*. Boston: McGraw-Hill.
- Gupta, S. 2007. Determinants of Tax Revenue Efforts in Developing Countries. *IMF Working Paper* 184.
- Imam, P. A. dan D. F. Jacobs. 2007. Effect of Corruption on Tax Revenues in the Middle East. *IMF Working Paper* 270.
- Kaufmann, D., dan A. Kraay. 2008. Governance Indicators: Where Are We, Where Should We Be Going? *The World Bank Research Observer* 23 (1): 1–30.
- Kaufmann, D., A. Kraay, dan M. Mastruzzi. 2003. Governance Matters III: Governance Indicators for 1996-2002. *World Bank Policy Research Working Paper*.
- Kaufmann, D., A. Kraay, dan M. Mastruzzi. 2009. Governance Matters VIII: Aggregate and Individual Governance Indicators 1996–2008. *Policy Research Working Paper* 4978.
- Kaufmann, D., A. Kraay, dan M. Mastruzzi. 2010. The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues. *World Bank Policy Research Working Paper* 5430.
- Kosack, S., dan Fung, A. 2014. Does Transparency Improve Governance? *The Annual Review of Political Science* 17: 65–87.
- Lotz, J. R. dan E. R. Morss. 1967. Measuring ‘Tax Effort’ in Developing Countries. *IMF Working Paper* 14.
- Mukhlis, I., Sugeng, H. U. dan Yuli, S. 2014. Increasing Tax Compliance Through Strengthening Capacity of Education Sector for Export Oriented SMEs Handicraft Field in East Java Indonesia. *European Scientific Journal* 10 (7): 170–184.
- Nachrowi, N. Djalal dan Hardius Usman. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: LPFE UI.
- Neumayer, E. 2002. Is Good Governance Rewarded? A Cross-national Analysis of Debt Forgiveness. *World Development* 30 (6): 913–930.
- Piancastelli, Marcelo. 2001. Measuring The Tax Effort of Developed and Developing Countries. *Texto Para Discussao* 818.

- Riddell, R. 2009. Does Foreign Aid Work? *WRR Scientific Council for Government Policy* 21: 47–70.
- Ross, Stephen A. 1973. The Economic Theory of Agency: The Principal's Problem. *The American Economic Review* 63 (2): 134–139.
- Santiso, C. 2001. Good Governance and Aid Effectiveness: The World Bank and Conditionality. *The Georgetown Public Policy Review*. 7 (1): 1–22.
- Shin, K. 1969. International Differences in Tax Ratio. *Review of Economics and Statistics* 51: 312–320.
- Stotsky, J. G. dan A. WoldeMariam. 1997. Tax Effort in Sub-Saharan Africa. *IMF Working Paper* 107.
- Syadullah, Makmun dan Tri Wibowo. 2015. Governance and Tax Revenue in ASEAN Countries. *Journal of Social and Development Sciences* 6 (2): 76–88.
- The International Tax Compact. 2010. Addressing Tax Evasion and Tax Avoidance in Developing Countries. Eschborn: The International Tax Compact.
- United Nations Development Programme. 2006. *A Guide to UNDP Democratic Governance*. New York: United Nations Development Programme.